

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sistem rujukan berjenjang merupakan mekanisme penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam pelayanan rujukan berjenjang harus menjalani perannya menjadi *gatekeeper* yaitu sebagai penyaring masalah kesehatan sebelum nantinya dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Dalam mendukung pelaksanaan sistem rujukan berjenjang di Puskesmas dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kepatuhan. Selain itu, dibutuhkan ketersediaan sumber daya lain seperti sarana dan prasarana, sumber daya informasi serta sumber daya finansial guna menjamin terlaksananya sistem rujukan berjenjang di Puskesmas sesuai dengan kebijakan yang berlaku yakni Permenkes No. 16 Tahun 2024 dan pedoman BPJS

Berdasarkan hasil penelitian, rasio rujukan dari Puskesmas Kelapa Gading masih berada dalam batas maksimal yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu 15%, dengan rata-rata rasio berkisar antara 9,1% hingga 9,8% sepanjang Januari-Mei 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rujukan telah dilakukan sesuai indikasi medis sesuai dengan Permenkes No. 16 Tahun 2024 dan pedoman BPJS. Tercapainya rasio ini didukung oleh beberapa aspek input seperti pembagian tugas SDM yang jelas, tersedianya fasilitas pendukung, serta pemanfaatan sistem informasi rujukan digital seperti SPGDT dan P-Care. Tenaga kesehatan juga memahami peran mereka dan sudah menjalankan prosedur sesuai regulasi. Koordinasi antarunit, seperti pertemuan rutin dan komunikasi lintas sektor, juga mendukung pelaksanaan sistem rujukan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman pasien tentang kebijakan rujukan, gangguan teknis pada sistem, serta keterbatasan sarana transportasi dalam kondisi gawat darurat.

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan sistem ini adalah keterbatasan fasilitas serta ketidaktahuan pasien terhadap daftar penyakit yang tidak memerlukan rujukan. Selain itu, perubahan kebijakan dari BPJS yang belum tersosialisasi secara optimal menambah beban kerja petugas di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat implementasi, baik dari sisi internal puskesmas maupun kerja sama lintas sektor dengan BPJS dan rumah sakit rujukan. Strategi tersebut mencakup peningkatan sosialisasi kebijakan kepada pasien, penambahan armada transportasi gawat darurat, penguatan pelatihan tenaga kesehatan, serta pembaruan sistem informasi secara berkala untuk meminimalkan gangguan teknis.

V.2 Saran

V.2.1 Saran untuk Puskesmas Kelapa Gading

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada pasien terkait alur dan kebijakan sistem rujukan, termasuk edukasi mengenai 144 diagnosis yang tidak memerlukan rujukan, guna mengurangi miskomunikasi dan tuntutan pasien yang tidak sesuai prosedur.
- b. Menambah jumlah tenaga kesehatan pada unit layanan dengan beban kerja tinggi seperti poli dan UGD, agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

V.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di rumah sakit untuk menilai kesiapan menerima rujukan, efektivitas koordinasi dengan Puskesmas, serta kendala dalam menindaklanjuti rujukan, sehingga analisis sistem rujukan lebih komprehensif.